



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS KESEHATAN

Jalan El Tari No. Maumere Kode Pos 86113 Telp. (0382) 21266, 21974
Email : dinkes_kabsikka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIKKA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

Kepala Dinas Kesehatan,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu pada bagian ketujuh Pasal 125-128 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2045;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : Maret 2024

✍ PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka *p.*



Petrus Herlemus, S.Si., Apt., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19711214 200112 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 30 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025. Melalui Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini, Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, Maret 2024

PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka



Petrus Herlemus, S.Si., Apt., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19711214 200112 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan	
Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas	
Kesehatan Kabupaten Sikka	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	
Dinas Kesehatan.....	12
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan	
Fungsi Dinas Kesehatan	16
2.4 Penalaahan Usulan Program dan	
Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan	
Nasional.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Renja Dinas Kesehatan	
Tahun 2025	22
3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN	
2025	30
BAB IV PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023	: 7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2023	: 17
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025	: 23
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	: 31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 2.1 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2019 s/d 2023	: 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Sebagai Renja tahun kedua untuk Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 memiliki arti penting memformulasikan program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan tiga tahun mendatang.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun berdasarkan data dan informasi dari Sekretariat, Bidang, Sub Bagian serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Data-data yang terkumpul kemudian dilakukan pengkajian terutama terhadap kondisi eksisting serta evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- 10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
- 12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;
- 13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
- 14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- 15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
- 16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka selama tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan secara berkesinambungan. Dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dimaksudkan juga untuk menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapaun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota secara sistematis dan terorganisir;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat tentang: Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu;, memuat tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, memuat tentang: Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan; serta Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024-2026. Dengan demikian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 masih mengacu pada pencapaian target kinerja sesuai indikator kinerja pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 serta hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Kesehatan tahun 2023.

Dinas Kesehatan selama tahun 2023 melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 61 sub kegiatan. Total anggaran belanja untuk melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 239.200.893.235,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 209.105.67.5153,- atau sebesar 87,42%. Anggaran dan realisasi belanja serta jumlah kegiatan dan sub kegiatan per program dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; alokasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 137,134,784,156,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 80.59% atau sebesar Rp. 110,521,626,047,-. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar 19.41%. Program ini dibagi kedalam 3 kegiatan dan 42 sub kegiatan serta mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2023. Pencapaian kinerja sasaran yang sebagian besar belum memenuhi target dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan belum mengoptimalkan dengan baik dana yang disediakan pada program ini untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,728,538,520,-. Persentase penyerapan anggaran pada program ini sebesar 82.49% atau sebesar Rp. 6,375,161,257,- dan sisa anggaran sebesar 17.51%. Program ini dibagi kedalam 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan serta mendukung pencapaian indikator-indikator pada 2 sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2023 yaitu menurunnya kematian ibu dan menurunnya angka kesakitan. Jika dikaitkan antara pencapaian indikator kinerja pada 2 sasaran

strategis tersebut yang sebagian besar belum memenuhi target dengan penyerapan anggaran pada program ini yang kurang dari 100% maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan belum mengoptimalkan dengan baik dana yang disediakan pada program ini untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; didalam program ini terdapat 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 354,062,830,- dengan persentase realisasi sebesar 82.01% atau Rp. 290,369,375,-. Masih ada anggaran sebesar 17.99% yang tidak terealisasi. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis menurunnya angka kesakitan. Jika dikaitkan antara pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis menurunnya angka kesakitan yang sebagian besar belum memenuhi target dengan penyerapan anggaran pada program ini yang kurang dari 100% maka bisa disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan belum mengoptimalkan dengan baik dana yang disediakan pada program ini untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; didalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pada sasaran strategis menurunnya angka kesakitan. Alokasi anggaran tahun 2023 pada program ini sebesar Rp. 2,395,383,600,- dengan persentase realisasi sebesar 91.28% atau Rp. 2,186,449,156,- dan sisa anggaran sebesar 8.72%. Jika dikaitkan antara pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis menurunnya angka kesakitan yang sebagian besar belum memenuhi target dengan penyerapan anggaran pada program ini yang kurang dari 100% maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan belum mengoptimalkan dengan baik dana yang disediakan pada program ini untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; program ini merupakan program penunjang yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023. Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan alokasi pagu Rp 91,588,124,129,- terealisasi 97.97% atau sebesar Rp. 89,732,069,318,-. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar 2.03%. Persentase penyerapan anggaran pada program ini cukup tinggi meskipun belum mencapai 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tergambar dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					
		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS KESEHATAN			239,200,893,235		209,105,675,153		87.42%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			137,134,784,156		110,521,626,047		80.59%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			56,774,650,910		43,201,009,216		76.09%
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	12,401,503,704	1	8,497,542,083	100%	68.52%
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	7	3,183,756,650	6	2,154,850,000	86%	67.68%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	11	5,377,901,647	7	3,291,747,987	64%	61.21%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	9	447,209,800	9	394,778,100	100%	88.28%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25	3,854,253,055	25	3,409,747,584	100%	88.47%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	391	20,888,071,700	350	18,728,972,750	90%	89.66%
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4	2,768,503,318	4	2,082,962,453	100%	75.24%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4	7,564,989,486	4	4,356,594,334		57.59%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yangTerpelihara Sesuai Standar	120	183,474,550	120.00	178,892,950	100%	97.50%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	200	104,987,000	200.00	104,920,975	100%	99.94%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					
		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			79,677,402,608		66,740,206,268		83.76%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5,582	3,713,384,400	4,980	3,412,832,384	89%	91.91%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5,153	207,463,674	5,001	203,205,591	97%	97.95%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5,074	31,700,000	5,001	30,200,000	99%	95.27%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24,654	903,664,800	21,500	790,775,000	87%	87.51%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60,079	648,192,900	56,340	606,233,942	94%	93.53%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207,049	619,761,400	120,500	411,084,400	58%	66.33%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21,974	1,158,967,000	19,800	1,127,241,400	90%	97.26%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79,497	31,046,000	45,200	15,850,000	57%	51.05%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2,382	30,646,000	1,234	13,500,000	52%	44.05%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	810	493,344,200	1,010	445,275,000	125%	90.26%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5,843	752,519,000	4,590	639,444,000	79%	84.97%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6,820	116,000,000	5,230	95,181,968	77%	82.05%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	406,786,600	12	375,175,000	0%	92.23%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	2,450,000	-	-	0%	0.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	8,126,345,000	12	6,902,916,832	100%	84.94%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	86,516,600	12	72,755,896	100%	84.09%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					
		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	865,433,700	12	760,352,608	100%	87.86%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	386,013,800	12	329,235,632	100%	85.29%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	1,113,743,200	12	742,002,592	100%	66.62%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	4,221,226,200	12	3,423,655,014	100%	81.11%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	44,852,767,800	12	37,117,526,522	100%	82.75%
Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	36	32,800,000	15	11,400,000	42%	34.76%
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	9,790,544,534	12	8,616,630,321	100%	88.01%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	963,786,000	12	505,332,166	100%	52.43%
Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	3,600,000	12	3,600,000	100%	100.00%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	11,125,000	12	10,350,000	100%	93.03%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	58,750,000	1	58,750,000	100%	100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1,000	14,624,800	1,200	13,400,000	120%	91.63%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	988	19,500,000	860	-	87%	0.00%
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	515	14,700,000	235	6,300,000	46%	42.86%
Penribitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			682,730,638	-	580,410,563		85.01%
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	30	28,337,400	-	-	0%	0.00%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional (INM) Pelayanan kesehatan	30	654,393,238	28	580,410,563.00	93%	88.69%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					
		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			7,728,538,520		6,375,161,257		82.49%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100.00	5,550,998,080	100.00	5,012,457,020	100%	90.30%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500	5,312,297,880	456	4,985,357,020	91%	93.85%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	238,700,200	12	27,100,000	100%	11.35%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	20.00	2,177,540,440	20.00	1,362,704,237	100%	62.58%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1,000.0	2,177,540,440	675	1,362,704,237	68%	62.58%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan minumam	100.00	354,062,830	100.00	290,369,375	100%	82.01%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100.00	86,598,000	100.00	86,598,000	100%	100.00%
Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.00	86,598,000	40	86,598,000	100%	100.00%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100.00	116,349,430	100.00	106,054,600	100%	91.15%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					
		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.0	116,349,430	15	106,054,600	100%	91.15%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100.00	151,115,400	100.00	97,716,775	100%	64.66%
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri RumahTangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka TindakLanjut Pengawasan	90.0	151,115,400	78	97,716,775	87%	64.66%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	30.00	2,395,383,600	30.00	2,186,449,156	100%	91.28%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif	60.00	2,395,383,600	60.00	2,186,449,156	100%	91.28%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat	12.0	2,395,383,600	12	2,186,449,156	100%	91.28%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100.00	91,588,124,129	100.00	89,732,069,318	100%	97.97%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00	70,702,100	100.00	51,700,000	100%	73.12%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	38,086,800	3	37,800,000	0%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	10	8,648,200	8	6,850,000	80%	79.21%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	23,967,100	12	7,050,000	67%	29.42%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100.00	90,679,777,429		89,085,658,373	0%	98.24%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					
		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,403	90,347,281,029	2,403	88,769,758,373	100%	98.25%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	332,496,400	12	315,900,000	100%	95.01%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100.00	250,387,800	100.00	217,343,225	100%	86.80%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	10	3,420,900	10	2,997,500	100%	87.62%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5,597,500	1	-	0%	0.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	60,142,400	4	51,262,120	100%	85.23%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	29,603,200	2	29,603,200	100%	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	151,623,800.00	5	133,480,405.00	100%	88.03%
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100.00	139,621,500	100.00	107,650,924	100%	77.10%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	139,621,500	36	107,650,924	100%	77.10%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100.00	447,635,300	100.00	269,716,796	100%	60.25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	35	447,635,300	35	269,716,796	100%	60.25%

Sumber : Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Target dan realisasi indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sebagaimana termuat di dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2028-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun :						Realisasi Capaian Tahun:					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Usia Harapan Hidup (UHH)		66,69	66,86	67,04	67,21	67,38	66,61	67,07	67,24	67,45	67,86	68,30
2	Prevalensi Stunting	30	29	18	10	5	0	36,1	25,1	19,1	18,2	13,8	15,3
3	Jumlah Kematian Ibu		8	0	0	0	0	10	12	7	9	8	3
4	Angka Kematian Neonatal		14	0	0	0	0	10	7	7	7	10	5.5
5	Angka Kematian Bayi		14	0	0	0	0	15	11	9	10	14	8.97
6	Prevalensi Wasting	13,5	123	12,5	12,0	11,5	11	8,0	8,2	7,0	6,9	10,6	4.0
7	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan			33	44,2	30	30			40,8	64,9	36	55,7
8	Cakupan Kunjungan Rawat Inap			2	0,8	0,8	0,8			7,0	3,7	4,0	0.10
9	Prevalensi HIV/AIDS		0,4	0,24	0,28	0,35	0,41		0,23	0,22	0,18	0,20	0.015
10	Anual Paracite Incidence (API)	0,5	0,4	0	0	0	0	0,88	0,48	0,23	0,19	1,57	0,82
11	Succes Rate TB (BTA +)	85	90	92	93	94	95	93,3	89,4	90,1	87,93	90,62	91,5
12	Incidence Rate Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	48,3	50	50	45	40	30	48	193	562	57	143	2,39
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90	95	95	100	100	100	78,1	91,3	90,0	95,0	84,7	95
14	Jumlah Desa/Kelurahan STBM	52	82	102	122	146	160	51	54	54	58	79	60
15	Persentase Desa Siaga Aktif	41,8	45	50	55	60	70	39,4	40,6	43,1	49,3	53,1	53,3

Sumber : Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan pencapaian sangat baik, yaitu Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate/SR) pasien TB semua Kasus, Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate), Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization) (UCI), Cakupan Kunjungan Rawat Inap serta 1 (satu) Indiaktor Kinerja dengan capaian tinggi yaitu Persentase Desa Siaga Aktif. Tingginya capaian kinerja 5 (lima) indicator tersebut dikarenakan aktifnya para pengelola program baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada sasaran disamping itu rendahnya kasus penyakit DBD pada tahun 2023 dan berkurangnya kunjungan masyarakat yang berobat (rawat inap) pada fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas).

Sedangkan masih terdapat 1 (satu) indikator yang masuk dalam Kategori Rendah yaitu Cakupan Kunjungan Rawat Jalan serta 11 (sebelas) indikator kinerja Dinas Kesehatan yang belum mencapai target atau masih dalam kategori kinerja sangat rendah. Belum tercapainya beberapa indikator di atas sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan karena ada beberapa target yang penetapannya sangat rendah sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk pencapaian target tersebut mengingat pencapaian indikator tersebut melibatkan banyak faktor antara lain perilaku, lingkungan, sarana dan prasarana, tenaga dan juga perlu adanya kerjasama lintas sector.

Capaian Indikator dengan penilaian yang masih sangat rendah berikut adalah rendahnya status gizi pada balita dapat dilihat dari indikator prevalensi stunting, prevalensi wasting dan prevalensi underweight. Masalah pokok masih rendahnya status gizi balita disebabkan oleh beberapa masalah yaitu:

1. Kurangnya asupan gizi pada balita

Indikasi kurangnya asupan gizi pada balita dapat dilihat dari indikator cakupan penanganan gizi pada balita. Masalah kurangnya asupan gizi pada balita disebabkan oleh akar masalah pola pemberian makan yang tidak tepat bagi balita dan pola asuh yang tidak optimal pada bayi dan balita.

2. Masih tingginya penyakit infeksi pada balita

Masalah tingginya penyakit infeksi pada balita disebabkan karena akar masalah: Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masih rendahnya jumlah bayi mendapat imunisasi dasar lengkap.

Selain pencapaian target indikator kinerja seperti yang sudah digambarkan diatas, Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 jenis pelayanan dasar SPM yaitu:

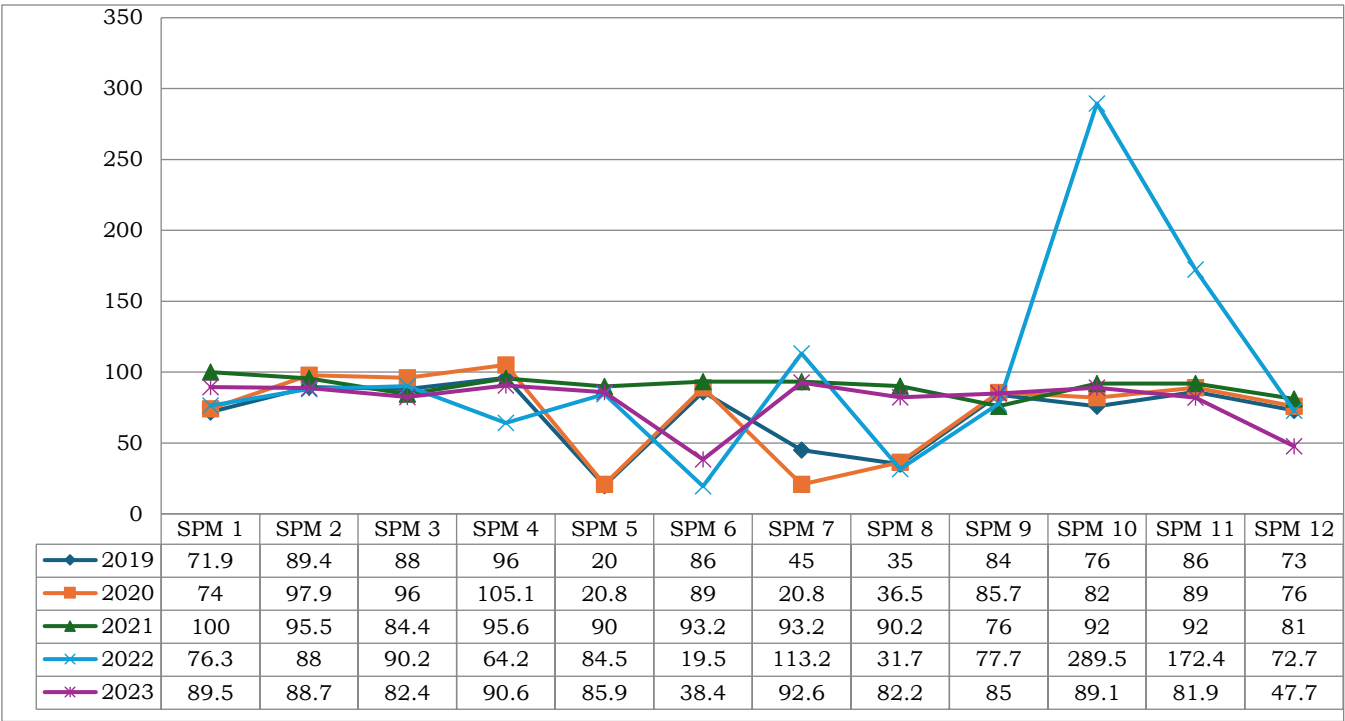
- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Penerapan SPM Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar LPPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2023 pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: (a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan (c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Target capaian kinerja 12 jenis pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah 100% yang berarti seluruh sasaran penduduk dari masing-masing jenis pelayanan SPM wajib mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun capaian kinerja 12 indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sikka pada periode tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.1
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2019 s/d 2023



Sumber: Olahan Dinas Kesehatan Kab. Sikka, 2023

Grafik 2.1 diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019, capaian kinerja tertinggi SPM Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan kesehatan balita yaitu sebesar 96% dan capaian terendah sebesar 20% pada indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Tidak terdapat indikator yang mencapai target 100 persen pada tahun tersebut.

Selanjutnya tahun 2020, indikator pelayanan kesehatan balita mencapai 105%, sedangkan 11 indikator lainnya tidak mencapai target 100%. Capaian terendah sebesar 20,8% pada indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Tahun 2021, indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai target 100% sedangkan capaian terendah sebesar 76% pada indikator pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. Target 100% pada tahun 2022 tercapai pada tiga indikator SPM yaitu pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 289,5%, indikator pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 172,4 % dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 113,2%. Pada tahun 2023 cakupan kinerja SPM tertinggi hanya mencapai 92,6% yakni pada indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut sedangkan capaian terendah sebesar 38,4% pada indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif.

Grafik 2.1 juga memberikan gambaran bahwan dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan, terdapat 7 indikator yang belum terpenuhi capaian 100% selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yaitu pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Masalah pokok pada Dinas Kesehatan adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator untuk menilai masalah pokok masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Sikka. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebesar 66,61 tahun naik menjadi 68,30 pada tahun 2023. Meskipun angka ini lebih tinggi dari UHH penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada angka 66,40 pada tahun 2018 dan 67,77 pada tahun 2023, akan tetapi UHH penduduk Kabupaten Sikka masih

dibawah rata-rata UHH nasional dimana UHH penduduk Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar 71,25 dan tahun 2022 sebesar 72,13.

Masalah pokok masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat disebabkan oleh beberapa masalah yaitu:

1. Masih tingginya jumlah kematian ibu

Indikator untuk melihat masalah masih tingginya angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu. Kasus kematian ibu di Kabupaten Sikka belum menunjukkan penurunan yang berarti. Pada tahun 2018, kasus kematian ibu sebanyak 10 kasus, meningkat menjadi 12 kasus pada tahun 2019. Meskipun ada penurunan jumlah kematian ibu pada tahun 2020 menjadi 7 kasus kematian ibu, namun pada tahun 2021 jumlah kematian ibu kembali bertambah menjadi 9 kasus. Tahun 2022 jumlah kematian ibu berhasil ditekan menjadi 8 kasus dan pada tahun 2023 hanya menjadi 3 kasus.

Masih tingginya angka kematian ibu disebabkan karena akar masalah masih tingginya jumlah ibu hamil risiko tinggi dan rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ibu hamil.

2. Masih tingginya jumlah kematian bayi

Indikasi masalah tingginya jumlah kematian bayi dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 cenderung fluktuatif. Tahun 2018, AKB tercatat sebesar 15 per 1.000 per kelahiran hidup, tahun 2019 sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 kembali terjadi penurunan AKB menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 AKB meningkat menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2022 sebesar 14 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 AKB kembali ditekan ke angka 8.97 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun AKB di Kabupaten Sikka dibawah target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu AKB sebesar 18,6 pada tahun 2023 akan tetapi fluktuasi angka perlu mendapat perhatian serius untuk perbaikan upaya penurunan AKB agar lebih konsisten. Target AKB SDG's 2030 adalah 12 per 1.000 kelahiran hidup.

Masih tingginya angka kematian bayi disebabkan karena akar masalah: Masih tingginya bayi baru lahir risiko tinggi dan rendahnya kuantitas kualitas pelayanan kesehatan bayi dan anak.

3. Masih tingginya angka kesakitan

Indikasi dari masalah masih tingginya angka kesakitan dapat dilihat dari indikator Insidensi HIV, Annual Paracite Incidence (API), Succes Rate TB (BTA +), Incidence Rate (IR) DBD, Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun, Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP, dan Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP.

Insidensi HIV di Kabupaten Sikka tahun 2023 berada pada angka 0,015 per 1.000 penduduk menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 0,23 per 1.000 penduduk. Insidensi HIV di Kabupaten Sikka sudah mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu tahun 2023 insidensi HIV secara nasional ditargetkan sebesar 0,19 per 1.000 penduduk.

Annual Paracite Incidence (API) di Kabupeten Sikka pada tahun 2018 sebesar 0,88 per 1.000 penduduk. Meskipun tahun 2022, API tercatat meningkat tajam menjadi 1,57 per 1.000 penduduk ditandai dengan peningkatan kasus malaria terkonfirmasi pemeriksaan laboratorium di Kecamatan Waiblama, akan tetapi pada tahun 2023 kemnbali dapat ditekan ke angka 0.82 per 1.000 penduduk. Target Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 API kurang dari 1 per 1.000 penduduk yang juga menjadi salah satu syarat eliminasi malaria. Peningkatan kasus malaria tahun 2022 menjadi tantangan upaya eliminasi malaria di Kabupaten Sikka.

Succes Rate TB (BTA +) di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 tercatat sebesar 91,50% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berada pada angka 93,3%.

Incidence Rate (IR) DBD di Kabupaten Sikka masih tinggi. Pada tahun 2020, DBD ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan IR DBD mencapai 562 per 100.000 penduduk. Tahun 2022 IR DBD sebesar 143 per 100.000 penduduk. Tahun 2023 menurun menjadi 2,39 per 100.000 penduduk.

Masih tingginya angka kesakitan disebabkan karena akar masalah: masih tingginya penyakit menular, masih tingginya penyakit tidak menular dan meningkatnya penyakit-penyakit baru (new emerging disesases).

4. Masih rendahnya status gizi balita

Indikasi masih rendahnya status gizi pada balita dapat dilihat dari indikator prevalensi wasting. Tahun 2018 prevalensi wasting dilaporkan sebesar 8,0% akan tetapi

pada tahun 2022 meningkat menjadi 10,6%. Prevalensi wasting berhasil ditekan pada tahun 2023 menjadi 4,0%.

Masalah masih rendahnya status gizi balita disebabkan oleh akar masalah Kurangnya asupan gizi pada balita

5. Masih tingginya prevalensi stunting

Indikasi masih tinginya prevalensi stunting dapat dilihat dari indikator prevalensi stunting. Prevalensi stunting di Kabupaten Sikka menunjukkan penurunan yang signifikan dari 36,1% pada tahun 2018 menjadi 13,8% pada tahun 2022. akan tetapi pada tahun 2023, prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 15,3%. Prevalensi stunting diharapkan terus dapat diturunkan sehingga tidak lagi ada balita dengan stunting di Kabupaten Sikka.

Masalah masih rendahnya status gizi balita disebabkan karena akar masalah masih tingginya angka gizi kronis pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2.4 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka secara keseluruhan merupakan perencanaan teknokratik yang disusun oleh Dinas Kesehatan dengan memperhatikan target indikator pada Renstra Dinas Kesehatan. Pada penyusunan Renja tahun 2023 tidak terdapat usulan untuk Dinas Kesehatan yang berasal dari usulan partisipatif hasil proses Musrembang baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten maupun usulan yang bersifat politis (pokok-pokok pikiran) anggota DPRD Kabupaten Sikka. Selain dari itu, Dinas Kesehatan mengalokasikan hibah dana bagi 2 (dua) lembaga yang bergerak dibidang kesehatan yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sikka dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sikka. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

No.	Prgram Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,				

	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
	1) Hibah untuk KPA Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 600.000.000,- 1 Paket	Terealisasi 100%
	2) Hibah untuk KPA Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 400.000.000,- 1 Paket	Terealisasi 100%

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”.

Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden, yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Searah dengan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah di Kabupaten yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
4. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sesungguhnya merupakan tujuan dan sasaran yang telah tertuang didalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah di bidang kesehatan secara keseluruhan. Dari hasil telaah terhadap RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, serta telaah terhadap tugas, fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, maka tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikatornya adalah Usia Harapan Hidup (UHH).

Selanjutnya tujuan Dinas Kesehatan tersebut dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Perumusan sasaran mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu membantu Bupati dalam urusan pemerintahan wajib dibidang kesehatan. Untuk pencapaian tujuan Dinas Kesehatan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu

Sasaran menurunnya Angka Kematian Ibu dengan indikatornya jumlah kematian ibu.

2. Menurunnya angka kematian bayi

Sasaran menurunnya angka kematian bayi dengan indikatornya adalah angka kematian bayi.

3. Menurunnya angka kesakitan

Sasaran menurunnya angka kesakitan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

- a) Insidensi HIV
 - b) Annual Paracite Incidence (API)
 - c) Succes Rate TB (BTA +)
 - d) Incidence Rate (IR) DBD
 - e) Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
 - f) Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di Puskesmas/FKTP
 - g) Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di Puskesmas/FKTP
4. Meningkatnya status gizi balita
- Sasaran meningkatnya status gizi balita dengan indikatornya adalah prevalensi wasting.
5. Menurunnya prevalensi stunting
- Sasaran menurunnya prevalensi stunting dengan indikatornya prevalensi stunting.
- Program dan Kegiatan

Adapun Tujuan dan sasaran beserta indikator dan target kinerja Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	68,02
		1. Menurunnya Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu	Orang	4
		2. Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	7
		3. Menurunnya Angka Kesakitan	Insidensi HIV	per 1000 penduduk	0,18
			Annual Paracite Incidence (API)	per 1.000 penduduk	0
			Succes Rate TB (BTA +)	Persen	95
			Incidence Rate (IR) DBD	per 100.000 penduduk	70

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Persen	21,18
			Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	80
			Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	80
		4. Meningkatnya Status Gizi Balita	Prevalensi Wasting	Persen	7,6
		5. Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	6

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan menyusun Renja Tahun 2025 dengan rincian 5 program, 18 kegiatan dan 72 sub kegiatan dalam rangka mendukung tujuan Dinas Kesehatan yang menjadi bagian dari sasaran strategis RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Total kebutuhan dana (pagu indikatif) untuk menyelenggarakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan di tahun 2024 sebesar Rp. 181,219,697,506,- tersebar di 26 sub unit (Dinas Kesehatan dan 25 UPT Puskesmas). Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024 terdiri atas beberapa sumber pendanaan yaitu BOK Kabupaten; BOK Puskesmas; Kapitasi JKN Puskesmas sebesar; Non kapitasi JKN Puskesmas; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan (DAU SG) serta Dana bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

- 1) Pengembangan Puskesmas
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 4) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 5) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - 6) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:
- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - 17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

- 20) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
 - 21) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 22) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 23) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 - 24) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - 25) Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 26) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 27) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - 28) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
 - 29) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - 30) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 31) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - 32) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - 33) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
 - 34) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
 - 35) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
 - 36) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- 1.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2.2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3.2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi P-IRT dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi Pangan IRT dan Nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh IRT
 - 3.3. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan Produk makanan minuman IRT, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 4.2. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 6 Kegiatan yaitu sebagai berikut;
 - 5.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 5.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 5.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 5.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Sikka dalam hal ini salah satu sasaran strategis pembangunan Kabupaten Sikka yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator usia harapan hidup;
3. Keserasian dan keberlanjutan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya serta target-target kinerja yang akan dicapai di masa mendatang; dan
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk tahun 2024 secara rinci rencana termuat dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	JUMLAH				181,219,697,506	-	-		184,931,427,705
1. 02. 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan				100,363,266,461				102,457,868,039
		1 Indeks Keluarga Sehat		0.6				0.80	
		2 Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM		100 Persen				100 Persen	
1 02 02 2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				13,427,946,467	-			13,696,505,396
		1 Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar		50 Persen	64			70	
		2 Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar		100 Persen	100			100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	25	921,755,730	DAU SG, Kapitasi JKN		25	940,190,845
1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kabupaten Sikka	25	100,282,500	DAU SG, Kapitasi JKN Puskesmas		25	102,288,150
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kabupaten Sikka	50	591,037,691	Kapitasi JKN Puskesmas		50	602,858,445
1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	100	107,854,200	DAU SG, BOK Kabupaten		100	110,011,284
1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kabupaten Sikka	4	11,224,848,446	DAU SG, DAU BG, BOK Kabupaten, DBH CHT, Kapitasi JKN Puskesmas		4	11,449,345,415

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Sikka	200	482,167,900	DAU BG. BOK Kabupaten		200	491,811,258
1 02 02 2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				86,387,527,804	-	-		88,547,215,999
		1 Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah		75 Persen				70	
		2 Persentase FKTP terakreditasi (%)		100 Persen				100	
		3 Presentase Puskesmas yang melakukan respon KLB/wabah		100 Persen				100	
		4 Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan		60 Persen				100	
		5 Persentase Desa / Kelurahan STBM		50 Persen				90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6 <i>Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan kerja</i>		40 Persen				60	
		7 <i>Persentase Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga</i>		100 Persen				100	
		8 <i>Persentase Desa / Kelurahan UCI</i>		100 Persen				100 Persen	
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Kabupaten Sikka	5,505	752,380,000	DAU BG, BOK Puskesmas		5,615	771,189,500
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	5,255	884,436,194	DAU BG, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas		5,610	906,547,099
1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	5,005	98,165,900	DAU BG, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas		5,605	100,620,048
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	61,632	1,526,136,400	BOK Puskesmas		6,738	1,564,289,810
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan	Kabupaten Sikka	22,631	64,811,200	BOK Kabupaten		5,958	66,431,480

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	85,977	6,200,000	DAU BG		7,225	6,355,000
1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	2,579	526,446,800	DAU BG		5,557	539,607,970
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	1,126	59,626,400	DAU BG		5,528	61,117,060
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	4,156	1,351,531,900	DAU BG		5,588	1,385,320,198
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	6,464	271,919,500	DAU BG		5,634	278,717,488
1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Kabupaten Sikka	12	28,700,000	DAU BG		12	29,417,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Sikka	12	6,979,112,810	DAU BG, BOK Puskesmas		12	7,153,590,630
1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kabupaten Sikka	12	29,915,000	DAU BG, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas		12	30,662,875
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kabupaten Sikka	12	2,235,601,100	DAU BG, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas		12	2,291,491,128
1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kabupaten Sikka	12	373,910,500	DAU BG, BOK kabupaten		12	383,258,263
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kabupaten Sikka		10,660,000	dau			10,926,500
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kabupaten Sikka	12	2,284,384,720	BOK Kabupaten BOK Puskesmas		12	2,341,494,338

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Sikka	250	56,341,200	BOK Puskesmas		250	57,749,730
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan PelayananKesehatan	Kabupaten Sikka		97,741,400	DAU			100,184,935
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kabupaten Sikka		58,404,800	DAU			59,864,920
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten Sikka	12	5,170,241,400	DAU BG, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas		12	5,299,497,435
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Sikka	12	46,182,237,491	DAU BG, DAU SG, Kapitasi JKN Puskesmas		12	47,336,793,428
1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kabupaten Sikka	5	53,207,400	DAU BG, BOK kabupaten		5	54,537,585

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			132,382,000	DAU			135,691,550
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kabupaten Sikka	12	11,747,486,179	DAU SG, BOK Puskesmas, Kapitasi JKN Puskesmas		12	12,041,173,333
1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Sikka	12	1,014,014,910	DAU BG, DAU SG, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas		12	1,039,365,283
1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Sikka	12	227,560,000	DAU		12	233,249,000
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kabupaten Sikka	12	113,080,000	BOK Puskesmas		12	115,907,000
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan ResponWabah	Kabupaten Sikka		39,704,500	DAU			40,697,113

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kabupaten Sikka	1	15,994,700	DAU		1	16,394,568
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Sikka	501	210,057,400	DAU BG, BOK Puskesmas		500	215,308,835
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kabupaten Sikka	81	142,279,600	DAU		90	145,836,590
1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kabupaten Sikka	500	175,349,600	DAU BG, BOK Puskesmas		500	179,733,340
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah dokumen Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kabupaten Sikka	12	40,659,200	DAU BG, BOK Puskesmas		12	41,675,680
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Sikka	12	592,100,000	DAU BG, BOK Puskesmas		12	606,902,500
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen engelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten Sikka	12	2,834,747,600	DAU BG, BOK Puskesmas		12	2,905,616,290

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				209,947,690	DAU BG, BOK Kabupaten	-		214,146,644
		1 Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		20				28	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten Sikka	12	209,947,690	DAU BG, BOK Kabupaten		12	214,146,644
1 02 02 2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				337,844,500				
		1 Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional		100 Persen				100 Persen	
		2 Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD		-				20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kabupaten Sikka	1	115,308,700	DAU		1	
1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kabupaten Sikka	25	222,535,800	DAU BG, BOK Kabupaten		25	226,986,516
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				6,872,996,980	-			7,010,456,920
		1 Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar		100 Persen				100	
		2 Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya		20 Persen				30	
		3 Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi		100 Persen				100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 03 2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar		100 Persen	4,736,608,580	-		100 Persen	4,831,340,752
1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kabupaten Sikka	200	4,596,587,780	DAU BG		300	4,688,519,536
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten Sikka	12	140,020,800	DAU		12	142,821,216
1 02 03 2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya		20 Persen	2,136,388,400			25 Persen	2,179,116,168
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kabupaten Sikka	300	2,136,388,400	BOK Kabupaten		350	2,179,116,168

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan minumam		100 Persen	427,330,400			100 Persen	435,877,008
1 02 04 2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		100 Persen	90,499,600			100 Persen	92,309,592
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Sikka	43	90,499,600	BOK Kabupaten		50	92,309,592
1.02.04.2.03.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi P-IRT dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		100 Persen	137,911,600			100 Persen	140,669,832

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi Pangan IRTP dan Nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Sikka	70	137,911,600	BOK Kabupaten		70	140,669,832
1.02.04.2.06.	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan Produk makanan minuman IRT	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga		100 Persen	198,919,200			100 Persen	202,897,584
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kabupaten Sikka	137	198,919,200	BOK Kabupaten		142	202,897,584

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		70 Persen	1,713,503,400	-		70 Persen	1,747,773,468
1.02.05.2.01.	Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif		60 Persen	1,245,643,200			70 Persen	1,270,556,064
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sikka	12	1,245,643,200	DAU BG, DAU SG, BOK Puskesmas		12	1,270,556,064
1 02 05 2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		70 Persen	467,860,200			80 Persen	477,217,404
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kabupaten Sikka	12	467,860,200	BOK Kabupaten, BOK Puskesmas		12	477,217,404
					-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	71,842,600,265	-	-	100 Persen	73,279,452,270
1.02.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	252,545,600			100 Persen	257,596,512
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka	5	107,427,000	Dau BG		5	109,575,540
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka	2	10,741,600	Dau BG		2	10,956,432
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sikka	4	134,377,000	Dau BG		4	137,064,540
1.02.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	69,582,361,954			100 Persen	70,974,009,193
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sikka	4175	69,116,281,954	DAU BG. DAU SG		4175	70,498,607,593

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sikka	12	466,080,000	Dau BG		12	475,401,600
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan		100 Persen	95,653,600			100 Persen	97,566,672
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sikka	12	18,402,800	Dau BG		12	18,770,856
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Sikka	12	33,340,000	Dau BG		12	34,006,800
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Sikka	12	29,599,200	Dau BG		12	30,191,184
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Sikka	12	14,311,600	Dau BG		12	14,597,832
1.02.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	807,049,200			100 Persen	823,190,184
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sikka	10	9,982,000	Dau BG		8	10,181,640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	125,540,400	Dau BG		1	128,051,208
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sikka	4	114,863,800	Dau BG		4	117,161,076
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Sikka	2	37,008,000	Dau BG		2	37,748,160
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sikka	30	519,655,000	Dau BG		35	530,048,100
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	20,770,000			100 Persen	21,185,400
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Kabupaten Sikka		20,770,000	Dau BG		12	21,185,400
1.02.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 Persen	204,124,683			100 Persen	208,207,177
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Sikka	12	179,174,683	Dau BG		12	182,758,177
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kabupaten Sikka	2	24,950,000	Dau BG		2	25,449,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
1.02.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	880,095,228			100 Persen	897,697,133
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Sikka	37	599,348,700	Dau BG		37	611,335,674
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Sikka	1	280,746,528	Dau BG		1	286,361,459

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 secara umum memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 serta mengevaluasi hasil perencanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupeten Sikka Tahun 2005 – 2025, RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 sehingga Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tiga tahun kedepan. Oleh karena itu beberapa kaidah pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka serta UPT yang ada dalam lingkup Dinas Kesehatan (1 UPT Labkesda dan 25 UPT Puskesmas) agar mendukung pencapaian target-target Renstra Dinas Kesehatan dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum didalam Renstra Dinas Kesehatan dengan sebaik-baiknya.
2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan ini berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dimana program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kesehatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025;

Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Maumere, Maret 2024

PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka *Y.*



Petrus Herlemus, S.Si., Apt., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19711214 200112 1 005